



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KETAHANAN PANGAN**

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

SPIP

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, kegiatan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian tentang upaya pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko, yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko.

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian mengacu kepada lima unsur pengendalian intern yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan Pengendalian Intern

Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil pemetaan, penilaian, atau evaluasi atas sistem pengendalian intern yang ada, dengan memperhatikan struktur dan praktik tata kelola organisasi.

Diperlukan komitmen dari semua pihak yang terkait untuk melaksanakan rekomendasi yang muncul dalam Laporan Rencana Tindak Pengendalian Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan Rencana Tindak Pengendalian ini kami mengucapkan terima kasih.

Kami berharap agar Rencana Tindak Pengendalian ini bermanfaat dan memiliki kontribusi konkrit bagi upaya pencapaian tujuan organisasi.

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Ir. DYAH LUKISARI, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19661016 199203 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
DAFTAR DIAGRAM	6
BAB I PENDAHULUAN.....	7
A. LATAR BELAKANG.....	7
B. DASAR HUKUM	7
C. MAKSUD DAN TUJUAN	9
D. RUANG LINGKUP	9
BAB II PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN.....	10
A. LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI.....	10
B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN.....	11
BAB III PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	12
A. PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN	12
B. HASIL IDENTIFIKASI RISIKO.....	14
C. HASIL ANALISIS RISIKO	24
D. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN	34
E. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN	35
BAB IV RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI.....	39
BAB V RANCANGAN PEMANTAUAN.....	42
BAB VI PENUTUP	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Kondisi Lingkungan Pengendalian Urusan Pilihan Pemerintah Daerah	11
Tabel 1. 2	Kondisi Lingkungan Pengendalian Urusan Pilihan Pemerintah Daerah	11
Tabel 3. 1	Hasil Identifikasi Risiko	15
Tabel 3. 2	Kategori Dampak Risiko Skala 5	25
Tabel 3. 3	Tingkat Kemungkinan/Probabilitas.....	25
Tabel 3. 4	Matriks Analisis Risiko.....	26
Tabel 3. 5	Level Risiko	26
Tabel 3. 6	Selera Risiko	27
Tabel 3.7	Pengendalian Yang Sudah Dilakukan	34
Tabel 3.8	Penilaian Atas Kegiatan Yang Ada dan Masih Dibutuhkan	37
Tabel 4.1	Rancangan Informasi dan Komunikasi	39
Tabel 5.1	Rancangan Pemantauan	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Perencanaan dan Penganggaran Serta Keterkaitan Antar Dokumen 12

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3. 1 Penilaian Risiko Prioritas..... 33

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu:

1. efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
2. keandalan pelaporan keuangan;
3. pengamanan aset negara; dan
4. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam merancang pengendalian intern di sektor pemerintahan.

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah menyusun Rencana Tindak Pengendalian, sebagai acuan bagi para penyelenggara tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2022 ini diprioritaskan untuk mencapai kualitas pencapaian tujuan organisasi, penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan didukung pengendalian intern yang memadai.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan *Control Self Assessment* untuk Penilaian Risiko;
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan *Control Environment Evaluation* (CEE);
8. Peraturan Kepala BPKP Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SPIP bagi Fasilitator BPKP ;
9. Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko;
10. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tanggal 21 Agustus 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
13. Keputusan Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 700/102/1.2/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 700/1541/1.2/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Jawa Tengah;
14. Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 526/0126.2 tanggal 9 Februari 2023 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas SPIP Terintegrasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Rencana Tindak Pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/ penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

2. Tujuan

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Penyelenggaraan SPIP ini meliputi pengelolaan risiko strategis pemerintah daerah, risiko strategis OPD, dan risiko kegiatan (operasional) OPD.

BAB II

PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Oleh karena itu, setiap organisasi wajib menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif agar sistem pengendalian intern dapat terimplementasi secara efektif.

Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang dapat mendorong tercapainya pengendalian intern yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

1. Penegakan integritas dan nilai etika;
2. Komitmen terhadap kompetensi;
3. Kepemimpinan yang kondusif;
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
8. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi.

Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern *Control Environment Evaluation* (CEE) kepada 45 (empat puluh lima) responden menunjukkan hasil semua lingkungan pengendalian memadai. Sedangkan dari revidu dokumen ditemukan masih adanya lingkungan pengendalian yang kurang memadai yaitu Komitmen terhadap kompetensi, dimana belum terdapat pelatihan terkait pengelolaan resiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala. Hanya 1 (satu) orang staff yang mendapat pelatihan, sedangkan masih banyak pengisian kertas kerja format MR yang diisi oleh penanggung jawab kegiatan yang belum sesuai panduan. Dari hasil penilaian lingkungan pengendalian tersebut selanjutnya divalidasi dan

disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan pilihan pada pemerintah daerah, diperoleh gambaran sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Kondisi Lingkungan Pengendalian Urusan Pilihan Pemerintah Daerah

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Kurang Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Memadai
6	Kebijakan Pengembangan SDM	Memadai
7	Pengawasan Internal yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah	Memadai

B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dengan pendekatan *Control Environment Evaluation*, menunjukkan ada tiga lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki. Sub Unsur yang masih perlu diperbaiki adalah Komitmen terhadap Kompetensi. Selanjutnya akan dilakukan pengendalian dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1. 2
Kondisi Lingkungan Pengendalian Urusan Pilihan Pemerintah Daerah

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
II	Komitmen terhadap Kompetensi			
1	Rencana kaderisasi staf yang kompeten untuk mendapat pelatihan terkait pengelolaan resiko	Pelatihan oleh pihak ketiga (BPSDMD/ BPKP Prov. Jateng/ Inspektorat) terkait pengelolaan manajemen resiko.	Kepala Dinas/Sekretaris	Tahun 2023

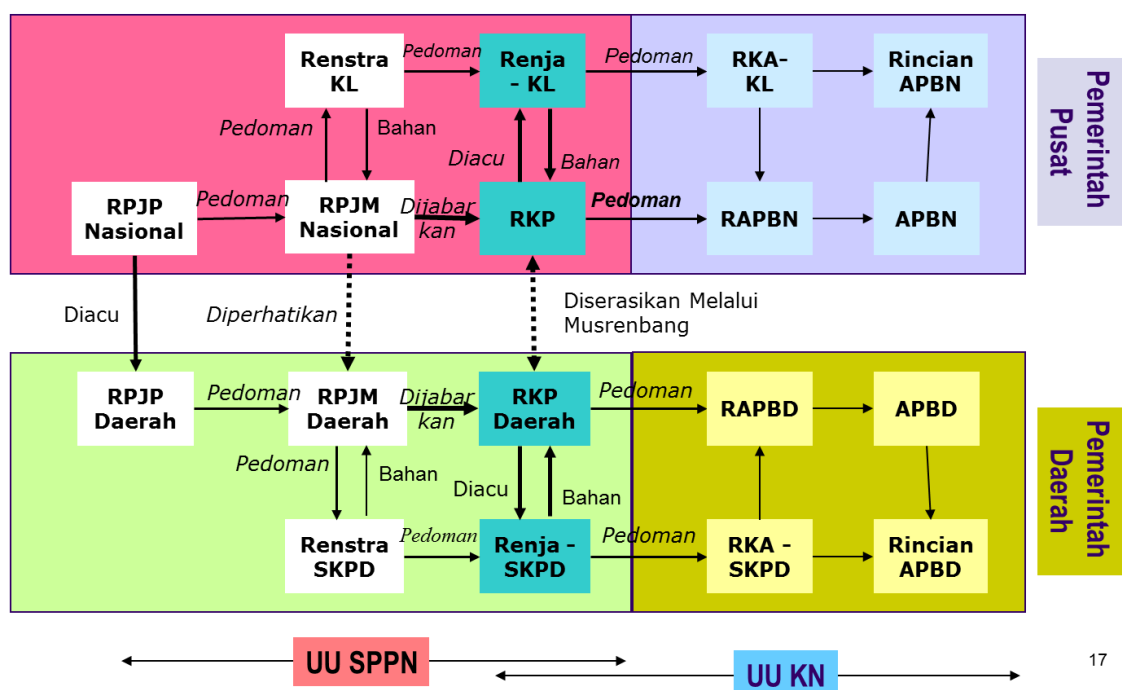
BAB III PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN

Dokumen perencanaan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) OPD, sebagai contoh, memuat antara lain tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah dan OPD dalam satu masa pemerintahan kepala daerah. Sedangkan tujuan pada tingkatan kegiatan, antara lain tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja OPD (Renja). Oleh karena itu, tujuan pemerintah daerah dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis tujuan, yaitu tujuan strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD, tujuan strategis OPD yang tertuang dalam dokumen Renstra OPD, dan tujuan pada tingkat kegiatan/operasional yang tertuang dalam dokumen Renja OPD.

Dalam kerangka perencanaan tersebut harus ada keselarasan antar dokumen sehingga masing-masing tingkatan akan saling mendukung dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah. Secara rinci keselarasan antar dokumen perencanaan tersebut tertuang dalam gambar berikut :

Gambar 2. 1
Alur Perencanaan dan Penganggaran Serta Keterkaitan Antar Dokumen



Provinsi Jawa Tengah dalam periode Tahun 2018-2023 memiliki Visi dan Misi, serta Program Unggulan yang telah ditetapkan dan tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu :

VISI :

Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera,
“(Tetep) Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.

MISI :

1. Membangun Masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
4. Menjadikan Rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah memiliki kewajiban untuk turut serta mewujudkan Visi dan Misi Jawa Tengah, terutama pada Misi ke-3, yaitu : “Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran”.

Tujuan dari Misi ke-3 ini adalah :

1. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah semakin religious, toleran, dan guyup;
2. Tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Kemiskinan di Jawa Tengah yang semakin menurun secara merata;
4. Stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan eksklusif berbasis potensi unggulan;
5. Sumber daya Jawa Tengah yang berkualitas dan berdaya saing;
6. Sumber daya alam dan lingkungan hidup Jawa Tengah yang lestari dan berkelanjutan.

Peran dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah adalah pada Tujuan ke-4 : Stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan eksklusif berbasis potensi unggulan, dengan program unggulan Menjaga harga komoditas dan asuransi harga panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan.

Mempertimbangkan hal-hal di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah pada Rencana Strategis Tahun 2018-2023, yaitu: “**Meningkatkan Ketahanan Pangan**”. Sesuai dengan tujuan yang

ingin dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, maka hasil yang diharapkan terwujud dalam sasaran, yaitu Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas.

B. HASIL IDENTIFIKASI RISIKO

Pengelolaan risiko strategis pemerintah daerah bertujuan untuk mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintahan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat pemerintah daerah dilakukan oleh Kepala Daerah bersama Wakil Kepala Daerah, dibantu oleh Kepala OPD selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Kepala Bappeda, atau OPD yang menangani perencanaan selaku koordinator teknis.

Pengelolaan risiko strategis OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis OPD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis OPD (Renstra OPD). Sedangkan pengelolaan risiko operasional OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama OPD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan OPD, seperti; Penetapan Kinerja OPD (Perkin), dan Rencana Kerja OPD (Renja dan/atau RKPD). Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan dibantu oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4.

Hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko) diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Hasil Identifikasi Risiko

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Sumber Risiko	C/UC	Dampak	Penerima Dampak
I Risiko Strategis Pemerintah Daerah							
1	Keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata antar waktu dan antar wilayah	Gubernur	Perbedaan Panen antar waktu dan antar wilayah	Eksternal	UC	1. Akses Pangan Masyarakat Terganggu 2. Harga pangan fluktuatif	Masyarakat
2	Rendahnya kemampuan menyerap hasil panen petani	Gubernur	Lembaga usaha yang ada di Jawa Tengah belum dapat menyerap panen secara optimal	Eksternal	UC	1. Hasil panen tidak dinikmati oleh masyarakat Jawa Tengah karena banyak dijual di luar Jawa Tengah 2. Peningkatan harga bahan pangan di tingkat konsumen	Masyarakat (Produsen)
3	Keterbatasan data stok pangan	Gubernur	Survei yang dilakukan masih bersifat sampling belum dapat menggambarkan kondisi Jawa Tengah secara keseluruhan	Internal	C	Kebijakan yang diambil tidak lagi relevan dalam menyelesaikan permasalahan	Masyarakat (Produsen, konsumen), stakeholders dalam SISLOGDA
II Risiko Strategis Perangkat Daerah							
1	Konsumsi pangan didominasi kelompok padi-padian	Kepala Dinas	Budaya pola konsumsi pangan masyarakat masih didominasi oleh beras sebagai pangan pokok	Eksternal	UC	Nilai komposisi pola pangan harapan belum ideal pada seluruh kelompok pangan	Masyarakat Jawa Tengah
2	Pangan sumber energi masih didominasi dari padi-padian	Kepala Dinas	Belum optimalnya pemanfaatan umbi-umbian sebagai sumber karbohidrat/ energi	Eksternal	UC	Angka konsumsi energi belum tercapai ideal	Masyarakat Jawa Tengah
3	Belum tercapainya angka konsumsi energi Jawa Tengah	Kepala Dinas	Konsumsi penduduk belum memenuhi prinsip B2SA (peningkatan konsumsi padi-padian, minyak lemak, sayur dan buah)	Eksternal	UC	Kecukupan energi di masyarakat tidak terpenuhi	Masyarakat Jawa Tengah
			Aksebilitas terhadap pangan di masyarakat belum merata	Eksternal	UC		
III Risiko Operasional Perangkat Daerah							
1	Ketersediaan energi kurang beragam, masih didominasi oleh kelompok jenis pangan tertentu	Kepala Dinas	Kurangnya data dan informasi mengenai ketersediaan kelompok pangan lain	Eksternal	UC	ketersediaan energi pangan yang beragam kurang optimal	Masyarakat Jawa Tengah
	Harga tidak stabil.	Kepala Dinas	Pasokan pangan tidak merata antar waktu dan antar wilayah	Eksternal	C	Bila produsen mendapatkan keuntungan lebih, harga di tingkat konsumen lebih tinggi dari HAP. Namun saat konsumen	Masyarakat Jawa Tengah (produsen dan konsumen)

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Sumber Risiko	C/UC	Dampak	Penerima Dampak
						memperoleh harga yang murah, harga di tingkat produsen lebih rendah dari HAP (produsen mengalami kerugian).	
	Cadangan pangan tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat rawan pangan	Kepala Dinas	Kurang optimalnya penyediaan cadangan pangan	Internal	C	Keterbatasan penanganan daerah rawan pangan	Masyarakat Jawa Tengah
	Masih minimnya alternatif pengganti beras di masyarakat.	Kepala Dinas	Harga pangan lokal belum dapat bersaing dengan harga pangan strategis	Eksternal	UC	Angka Konsumsi Beras Melebihi angka ideal.	Masyarakat Jawa Tengah
			Rendahnya preferensi masyarakat terhadap pangan lokal	Eksternal	UC		Masyarakat Jawa Tengah
2	Data dasar penyusunan NBM kurang akurat	Ka. Bid. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Data yang diterima dari Dinas teknis terkait dan Instansi Pangan Kabupaten Kota belum lengkap	Eksternal	C	Rekomendasi kurang tepat	Instansi Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota
	Data dasar penyusunan prognosa neraca pangan kurang akurat	Ka. Bid. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Data yang diterima dari Dinas teknis terkait dan Instansi Pangan Kabupaten Kota belum lengkap	Eksternal	C	Data kurang dapat menggambarkan kondisi neraca	Instansi Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota
	Data harga pangan strategis kurang akurat.	Ka. Bid. Distribusi dan Cadangan Pangan	Keterlambatan dalam pemantauan di lapangan, ketelitian dalam input data.	Eksternal	C	Data tidak dapat dimanfaatkan untuk analisis dan bahan pengambilan kebijakan.	OPD
	Belum optimalnya intervensi harga pangan strategis	Ka. Bid. Distribusi dan Cadangan Pangan	Keterbatasan anggaran, kurangnya monitoring dan evaluasi harga pangan strategis ditingkat produsen dan konsumen	Eksternal	UC	harga masih fluktuatif di beberapa daerah, terutama komoditas yang mempengaruhi inflasi daerah	Masyarakat
3	Kebijakan pengembangan pangan lokal potensi daerah tidak optimal	Ka. Bid. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Data produksi pangan lokal belum teridentifikasi secara lengkap dan akurat	Eksternal	UC	1. Upaya pengembangan pangan lokal tidak optimal 2. Upaya diversifikasi pangan sulit tercapai	Masyarakat/ OPD
4	Tidak tersedia data realtime yang menggambarkan kondisi Jawa Tengah	Ka. Bid. Distribusi dan cad. Pangan	Keterlambatan pemantauan di lapangan, keterlambatan pengiriman data, ketidaktelitian dalam input data.	Eksternal	C	Data tidak menggambarkan kondisi distribusi dan logistik pangan Provinsi Jawa Tengah secara utuh, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan	Masyarakat
	Lembaga usaha pangan tidak berjalan optimal	Ka. Bid. Distribusi dan cad. Pangan	Kurangnya pengetahuan dan keterampilan SDM dalam menjalankan usaha distribusi	Eksternal	UC	Usaha kelompok tidak berkembang optimal	Lembaga Usaha Pangan Masyarakat

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Sumber Risiko	C/UC	Dampak	Penerima Dampak
			pangan; Kurangnya sarpras pendukung usaha distribusi pangan; Kurangnya modal sehingga kalah bersaing dengan swasta besar				
	Bahan pangan tidak dapat terdistribusi secara merata di sepanjang wilayah	Ka. Distribusi dan cad. Pangan	Keterbatasan anggaran, panjangnya rantai distribusi pangan	Eksternal dan Internal	UC	Pasokan dan harga tidak stabil sepanjang tahun	OPD dan Masyarakat
	Tidak terserapnya produk petani	Ka. Distribusi dan cad. Pangan	Tidak ada pembeli/pasar yang menyerap produk petani	Eksternal	UC	Produsen mengalami kerugian	Produsen
5	Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dikelola di bawah standar ketentuan yang berlaku	Ka. Distribusi dan cad. Pangan	Keterbatasan anggaran dan sarpras, kurangnya pengawasan.	Eksternal dan Internal	UC/C	Belum dapat mengintervensi seluruh kondisi rawan pangan transien di Jawa Tengah.	Masyarakat
	Tidak tersedia cadangan pangan di Lumbung Pangan Masyarakat	Ka. Distribusi dan cad. Pangan	Keterbatasan anggaran, SDM pengelola cadangan pangan masyarakat, dan sarpras.	Eksternal	UC	Tidak tertanganinya rawan pangan secara mandiri.	Masyarakat
	Mark up harga gabah	Ka. Distribusi dan cad. Pangan	Ada kesepakatan terselubung antara pelaksana dengan penyedia	Internal	C	kerugian negara	Masyarakat
	Lokasi tidak tepat sasaran sesuai juknis	Ka. Distribusi dan cad. Pangan	Lokasi sasaran diintervensi oleh pihak eksternal	Eksternal	UC	tidak efektif dan efisiennya bantuan	Masyarakat
	Kualitas dan rendemen gabah menurun	Ka. Distribusi dan cad. Pangan	Harga gabah di pasaran tinggi	Eksternal	UC	Tidak optimalnya pemanfaatan bantuan	Masyarakat
6	Belum ada data dan informasi potensi dan produk olahan komoditas pangan lokal yang dapat diakses masyarakat Jawa Tengah	Bidang KPP	Belum adanya sumber data potensi dan produk olahan yang valid dan menyeluruh wilayah se Jawa Tengah	Internal	UC	aspek bisnis produk olahan pangan lokal belum berkembang optimal	Masyarakat Jawa Tengah
	Relevansi antara strategi intervensi pengembangan pangan lokal dengan kondisi di lapangan masih rendah	Bidang KPP	Belum ada data kebutuhan pengembangan pangan lokal di seluruh wilayah Jawa Tengah	Internal	UC	Intervensi pengembangan pangan lokal belum optimal	Masyarakat Jawa Tengah
	Jenis, spesifikasi dan kualitas alat tidak sesuai	Bidang KPP	Paket alat ditentukan secara top down dan disamakan untuk semua penerima manfaat			Stimulan alat pengolah pangan lokal tidak seleuruhnya efektif dimanfaatkan oleh penerima manfaat	Masyarakat Jawa Tengah

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Sumber Risiko	C/UC	Dampak	Penerima Dampak
	skala dan kebutuhan riil di lapangan						
	keterjangkauan penyebaran informasi B2SA rendah	Bidang KPP	Minimnya pemanfaatan media dalam pelaksanaan edukasi dan promosi B2SA dan pangan lokal	Internal	C	Penyebaran informasi melalui promosi dan edukasi B2SA belum optimal	Masyarakat Jawa Tengah
	Agenda Edukasi B2SA belum optimal	Bidang KPP	Edukasi B2SA belum mendasarkan skor PPH di masing masing wilayah		UC	permasalahan gizi dan angka stunting di Jawa Tengah masih tinggi	Masyarakat Jawa Tengah
7	Bantuan OPP belum optimal	Bidang KPP	Kurangnya pengetahuan dan keterampilan SDM dalam menjalankan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan;		UC	Produktivitas OPP rendah	Masyarakat Jawa Tengah
	Kegiatan OPP tidak berkelanjutan	Bidang KPP	Kurangnya sinergitas penerima OPP dengan perangkat desa untuk keberlanjutan kegiatan OPP dengan menggunakan bantuan dana desa 20%	Eksternal	UC	Kurangnya motivasi dan dukungan dana desa untuk keberlanjutan kegiatan OPP	Masyarakat Jawa Tengah
	Waktu pelaksanaan pengadaan tidak sesuai jadwal dan kualitas barang rendah	Bidang KPP	penjadwalan pengadaan yang tidak memperhatikan musim	Internal	UC	stimulan tidak dapat memberikan manfaat dan secara optimal (byk yg mati)	Masyarakat Jawa Tengah
8	Penyimpangan terhadap persyaratan keamanan pangan dan mutu PSAT di peredaran.	Kepala Dinas	Kurangnya pemahaman Pelaku Usaha dan Pengawasan PSAT terhadap keamanan dan mutu pangan.	internal dan eksternal		kesehatan masyarakat terganggu	Masyarakat Jawa Tengah
	Ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap jaminan mutu dan keamanan yang telah diterbitkan.	Kepala Dinas	Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mematuhi jaminan mutu dan keamanan yang telah diterbitkan.	Internal dan eksternal	C	Produk yang telah teregistrasi tidak sesuai dengan jaminan mutu dan keamanan yang diterbitkan.	Masyarakat Jawa Tengah
9	Kajian tidak dipublikasi	Ka. Bid. Keamanan Pangan	Keterbatasan kapasitas tim penyusun dalam menyusun naskah publikasi	internal	C	Hasil kajian tidak diketahui pihak terkait	masyarakat
	Pelanggaran label PSAT	Ka. Bid. Keamanan Pangan	pelaku usaha tidak memahami ketentuan label PSAT	eksternal	UC/C	masyarakat mendapatkan informasi yang tidak sesuai ketentuan	Masyarakat
	Hasil pengujian tidak ditindaklanjuti	Ka. Bid. Keamanan Pangan	kewenangan tim pengawas terbatas	internal	C	PSAT yang beredar di Jawa Tengah belum aman	Masyarakat
	Informasi keamanan pangan diterima oleh	Ka. Bid. Keamanan Pangan	Belum efektifnya pelaksanaan pengawasan keamanan pangan secara terpadu	internal, eksternal	C/UC	PSAT yang beredar di Jawa Tengah belum aman	Masyarakat

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Sumber Risiko	C/UC	Dampak	Penerima Dampak
	masyarakat secara parsial. antar sektor						
	Sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan belum menjangkau sasaran secara luas	Ka. Bid. Keamanan Pangan	Pemanfaatan media sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan masih minim.	internal, eksternal	C/UC	Masih banyak masyarakat yang belum memahami keamanan dan mutu pangan	Masyarakat
10	Kelompok/ pelaku usaha belum memahami prinsip higiene sanitasi dalam penanganan pangan	Ka. Bid. Keamanan Pangan	Keterbatasan jumlah petugas dan narasumber	internal	C/UC	PSAT yang beredar di Jawa Tengah belum aman	Masyarakat
	Kelompok/ pelaku usaha belum menerapkan prinsip higiene sanitasi dalam penanganan pangan	Ka. Bid. Keamanan Pangan	Keterbatasan jumlah petugas dan narasumber, petugas tidak kompeten	internal, eksternal	C/UC	PSAT yang beredar di Jawa Tengah belum aman	Masyarakat
11	Keterbatasan layanan pengujian mutu pangan	Ka. BPMKP	Keterbatasan ruang lingkup akreditasi pengujian, SDM dan sarana prasarana labolatorium	Internal dan Eksternal	C	Pelayanan pengujian belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara mandiri oleh Laboratorium Pengujian Mutu Pangan	Masyarakat/Konsumen
12	Ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap jaminan mutu dan keamanan yang telah diterbitkan.	Ka. BPMKP	Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mematuhi jaminan mutu dan keamanan yang telah diterbitkan.	Internal dan Eksternal	C	Produk yang telah teregistrasi tidak sesuai dengan jaminan mutu dan keamanan yang diterbitkan.	Masyarakat/Konsumen
13	Penanganan daerah yang mengalami rawan pangan <i>dan gizi</i> masih rendah.	Kepala Dinas	kurang optimalnya penanganan daerah rawan pangan <i>dan gizi</i>	Internal	U	Pendapatan perkapita rendah	Masyarakat Jawa Tengah
14	Fasilitasi penanganan pada daerah rawan pangan belum optimal	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Belum semua masyarakat miskin pada daerah rawan pangan menerima fasilitasi stimulan penanganan daerah rawan pangan.	Intenal	U	Fasilitasi penanganan daerah rawan pangan mengalami stagnan.	Masyarakat Jawa Tegah
	Fasilitasi bantuan pada lokasi DMP belum optimal	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Terbatasnya masyarakat miskin Penerima fasilitasi stimulan DMP.	Intenal	U	Fasilitasi penanganan Mandiri Pangan (DMP) mengalami stagnan.	Masyarakat Jawa Tegah
	Stimulan tidak tepat sasaran	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Topografi dan agroklimat lokasi DMP	Eksternal	UC	Kemanfaatan stimulan tidak maksimal	Masyarakat Jawa Tegah
	Data dasar Peta SKPG dan atau FSVA yang dihasilkan kurang akurat	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Data yang diterima dari Dinas teknis terkait dan Instansi yang menanganai ketahanan Pangan Kabupaten/Kota belum lengkap.	Eksternal	UC	Terlambatnya penyusunan laporan Peta SKPG dan atau FSVA.	Instansi Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Sumber Risiko	C/UC	Dampak	Penerima Dampak
IV	Risiko Penunjang Perangkat Daerah						
1	Tidak akuratnya penyajian data awal	Kepala Sub Bagian Keuangan	Data yang disampaikan tidak akurat	Internal	C	Penyediaan gaji dan tunjangan tidak tepat waktu	Dinas Ketahanan Pangan
	Tidak terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Kepala Sub Bagian Keuangan	Data yang disampaikan tidak akurat dan sering terjadi perubahan	Internal	C	Menurunnya kinerja pelaksana kegiatan	Dinas Ketahanan Pangan
	Tidak akuratnya penyajian data awal penyusunan laporan dan verifikasi keuangan	Kepala Sub Bagian Keuangan	Data yang disampaikan tidak akurat	Internal	C	Penyajian laporan yang kurang akuntabel	Dinas Ketahanan Pangan
2	Ketidaksesuaian rincian RAB dengan pilihan indikator kegiatan/sub kegiatan	Kepala Sub Bagian Program	Waktu penginputan aplikasi penganggaran terbatas/singkat	Eksternal	UC	Beberapa kegiatan/sub kegiatan perlu disesuaikan kembali pada anggaran perubahan	Dinas Ketahanan Pangan
	Tidak semua RAB barang/jasa yang dibutuhkan ada di eSHB	Kepala Sub Bagian Program	Terbatasnya barang/jasa dan speknya yang terdapat pada eSHB	Eksternal	C	Beberapa barang/jasa terpaksa harus menyesuaikan spek yang ada di eSHB	Dinas Ketahanan Pangan
	Tidak tercapainya salah satu atau beberapa indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan	Kepala Sub Bagian Program	Kekurangcermatan/pertimbangan dalam penentuan target	Internal	C	Nilai SAKIP OPD menurun	Dinas Ketahanan Pangan
3	1. Terjadinya kerusakan jaringan listrik dan komponen listrik 2. Kabel listrik dimakan tikus	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dishanpan & BPMKP	1. Kondisi jaringan kelistrikan putus 2. Kabel-kabel listrik banyak yang berserakan di lantai	Internal	C	1. Aktivitas kantor menjadi terhambat, pekerjaan terbengkalai/terjadi keterlambatan 2. Dapat menyebabkan kebakaran	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
	Terhambatnya kegiatan kantor	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Perlengkapan kantor sudah tidak tercukupi/tidak memadai dengan kegiatan organisasi	Internal	C	Tidak Terlaksananya Kegiatan Perkantoran dengan baik	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
	Terhambatnya pekerjaan kantor	Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPMKP	Peralatan dan perlengkapan kantor sudah tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan organisasi	Internal	C	Terjadinya kekurangan peralatan dan perlengkapan kantor untuk di gunakan dalam kegiatan kantor sehari-hari	BPMKP Dishanpan Provinsi Jawa Tengah
	Pengadaan alat laboratorium tidak disetujui oleh Ketua TKDN/Sekda	Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPMKP	Pengadaan alat laboratorium suku cadangnya masih impor	Eksternal	UC	Mengurangi skor akreditasi laboratorium dan mengurangi kualitas/kuantitas pelayanan pengujian	BPMKP Dishanpan Provinsi Jawa Tengah

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Sumber Risiko	C/UC	Dampak	Penerima Dampak
	Dalam Pelaksanaan Kegiatan Kantor menjadi tidak nyaman	Ka. Subag. Umum dan Kepegawaian Dishanpan & BPMKP	Alat rumah tangga tidak tersedia	Internal	C	Ruangan dan lingkungan kantor menjadi tidak terawat	Dishanpan prov Jateng
	Tamu yang datang dengan konfirmasi waktu yang terbatas tidak dapat ter spj konsumsinya	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dishanpan & BPMKP	Penyedia jasa konsumsi di aplikasi e-Blangkon tidak segera merespon pesanan	Internal	C	Banyak waktu yang diperlukan untuk mencari penyedia yang cepat merespon pesanan di hari dan waktu yang segera	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
	Kehadiran peserta rapat koordinasi terhambat dan kurang maksimal	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggaran belum tersedia	Internal	C	Tidak adanya koordinasi	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
	Tertundanya keputusan rapat	Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPMKP	Adanya aturan social distancing akibat tingginya kasus Covid-19	Internal	C	Tidak terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	BPMKP Dishanpan Provinsi Jawa Tengah
	1. Arsip dimakan rayap 2. Tulisan pada arsip hilang/luntur	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Tidak adanya tempat penyimpanan khusus untuk arsip-arsip 2. Tinta yang digunakan kurang baik	Internal	UC	Saat membutuhkan arsip-arsip menjadi sulit mencarinya	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
	Gangguan eksternal dari penyedia jaringan internet	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Adanya kendala jaringan internet	Eksternal	UC	Tidak terlaksananya sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
	Sarpras pencetak tidak berfungsi maksimal	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sarpras kurang perawatan	Internal	C	Pendistribusian barang cetakan terhambat	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
	Ruangan dan lingkungan kantor tidak terawat	Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPMKP	Alat rumah tangga tidak tersedia	Internal	C	Dalam pelaksanaan kegiatan kantor menjadi tidak nyaman	BPMKP Dishanpan Provinsi Jawa Tengah
4	Distribusi surat menyurat masih membutuhkan waktu yang lama	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Masih menggunakan jasa pengirim surat untuk mendistribusikan surat-surat dinas	Eksternal	UC	Informasi tidak tersampaikan dan menghambat pekerjaan	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
	Terjadinya kenaikan tarif penyediaan jasa	Kepala Sub Bagian Umum	Biaya operasional pihak penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik tinggi	Eksternal	C	Terhambatnya pekerjaan yang menggunakan sumber daya air dan listrik	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Sumber Risiko	C/UC	Dampak	Penerima Dampak
	komunikasi, sumber daya air, dan listrik	dan Kepegawaian				sehingga akan menurunkan kinerja petugas dan akan berdampak pada menurunnya pelayanan publik	
	Honor pegawai kontrak tidak dapat disesuaikan dengan kinerja	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	SK pegawai kontrak ditetapkan setiap tahun dengan angka yang tetap disetiap bulannya	Internal	C	Kinerja pegawai kontrak tidak terukur kompetensinya	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
	Terjadinya tindak kriminalitas dan kebersihan lingkungan terbengkalai	Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPMKP	Tidak adanya petugas penjagaan dan kebersihan lingkungan	Internal	C	Banyak barang kantor yang hilang dan tidak terawat	BPMKP Dishanpan Provinsi Jawa Tengah
5	Kinerja JFT (Jabatan Fungsional Tertentu) penyetaraan harus mengimbangi kinerja JFT murni	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Adanya peraturan perundang-undangan terbaru terkait penyetaraan jabatan struktural dan fungsional	Internal	UC	JFT penyetaraan kesulitan mengimbangi kinerja JFT murni	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
	Tidak semua aparatur mengikuti kegiatan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Adanya kegiatan lain yang bersamaan dengan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur	Internal	C	Pelaksanaan kegiatan tidak optimal	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
6	Tingginya risiko kerusakan dan kehilangan Barang Milik Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Klaim yang ditolak oleh pihak penjamin (asuransi)	Internal	C	Barang Milik Daerah yang rusak/hilang tidak bisa diperbaiki atau diganti dengan yang baru	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
	Tanah tidak dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tupoksi	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Letak tanah jauh dari jangkauan OPD	Internal	C	Tanah mangkrak dikuasai pihak lain	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
7	Gedung rusak dan membahayakan bagi pengguna dan pegawai	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tidak dilakukan pemeliharaan rutin secara optimal	Eksternal	C	Mengganggu dan menghambat aktivitas pekerjaan kantor	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
	Kerusakan gedung semakin parah dan gedung tidak dapat digunakan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPMKP	Gedung kantor tidak dilakukan pemeliharaan rutin	Internal	C	Gedung kantor yang sudah tua usianya dan rusak membahayakan pegawai	BPMKP Dishanpan Provinsi Jawa Tengah
	Markup nilai kontrak rehab gedung	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Ada kesepakatan terselubung antara pelaksana dengan penyedia	Internal	C	Kualitas gedung yang direhab tidak sesuai dengan kualitas	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Sumber Risiko	C/UC	Dampak	Penerima Dampak
	1. Pekerjaan terhambat karena komputer terkena virus 2. Tidak terawatnya peralatan dan perlengkapan kantor	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Komputer digunakan oleh banyak orang 2. Terlambat pelaksanaannya	Internal	C	Menghambat pelaksanaan kegiatan	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
	Pekerjaan kantor terhambat karena sarana dan prasarana kantor banyak yang rusak dan tidak terawat	Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPMKP	Anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor tidak tersedia dengan cukup	Internal	C	Menghambat pelaksanaan kegiatan	BPMKP Dishanpan Provinsi Jawa Tengah
	Kendaraan banyak yang tidak layak jalan untuk operasional kegiatan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Perawatan tidak dilakukan termasuk tidak terbayarnya pajak kendaraan	Internal	C	Kendaraan operasional dinas tidak dapat digunakan untuk menunjang kegiatan dinas	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

C. HASIL ANALISIS RISIKO

Penetapan struktur analisis risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah (*Stakeholders*) mengenai aspek-aspek pengelolaan risiko, yang antara lain meliputi:

- a. Sumber risiko, berasal dari internal dan eksternal.
- b. Dampak risiko, diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh atau akibat yang ditimbulkan seandainya peristiwa/kejadian yang menghambat pencapaian tujuan terjadi.
- c. Pihak yang terkena dampak, diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh dampak tersebut kepada pihak-pihak yang terkait dengan pencapaian tujuan.

Kemudian dilakukan penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah (*Stakeholders*) mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*) atau tingkat risiko yang dapat ditoleransi (*tolerable risk*) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (*unacceptable risk*) dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

Rumusan kriteria tersebut, ditetapkan oleh pihak manajemen sesuai dengan kebutuhan instansi yang bersangkutan. Setelah itu, dilakukan penilaian risiko terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko, kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko dan skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (*unacceptable risk*).

Dalam penyusunan RTP ini tim menggunakan skala dampak dalam skala 5, contoh kategori dampak risiko dan operasionalisasinya dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Kategori Dampak Risiko Skala 5

Kategori Dampak	Skor	Operasionalisasi Dampak Risiko			
		Keuangan	Kinerja	Reputasi	Hukum
Sangat Kecil	1	Kerugian tidak material	Hambatan kegiatan tertangani, tujuan tercapai	Ada pemberitaan negatif namun tidak material	Sanksi teguran lisan
Kecil	2	Kerugian kecil, kurang material	Kerugian terhambat, kurang efisien	Negatif, terdapat pemberitaan	Pelanggaran biasa, sanksi disiplin ringan
Sedang	3	Kerugian cukup besar	Kegiatan terhambat, kurang efektif	Negatif tersebar di beberapa media lokal	Pelanggaran biasa, sanksi disiplin sedang
Besar	4	Kerugian besar	Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif	Negatif tersebar di beberapa media nasional/ lokal	Pelanggaran serius, saksi tertulis berat
Sangat Besar	5	Kerugian sangat besar	Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	Negatif tersebar di beberapa media nasional/ lokal	Pelanggaran serius, sanksi berat dengan hukuman pidana

Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko. Untuk skala probabilitas, tim penyusun menggunakan kriteria penilaian skala 4, dengan ilustrasi sebagai berikut :

Tabel 3. 3
Tingkat Kemungkinan/Probabilitas

Tingkat Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan	
	Persentase kemungkinan terjadinya dalam 1 periode	Jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1 periode
Hampir tidak terjadi (1)	$x < 5\%$	Sangat jarang: < 2 kali dalam 1 tahun
Jarang terjadi (2)	$5\% < x \leq 10\%$	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali dalam 1 tahun
Kadang terjadi (3)	$10\% < x \leq 20\%$	Cukup sering: 6 kali s.d. 9 kali dalam 1 tahun
Sering terjadi (4)	$20\% < x \leq 50\%$	Sering: 10 kali s.d. 12 kali dalam 1 tahun
Hampir pasti terjadi (5)	$x > 50\%$	Sangat sering: >12 kali dalam 1 tahun

Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (*unacceptable risk*). Dalam menentukan skala risiko penulis menggunakan nilai skala 5 dengan ilustrasi sebagai berikut :

Tabel 3. 4

Matriks Analisis Risiko

Matriks Analisis Risiko			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Kecil	sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Level kemungkinan	5	Hampir Pasti					
	4	Kemungkinan Besar					
	3	Mungkin					
	2	Jarang					
	1	Sangat Jarang					

Tabel 3.5

Level Risiko

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	15 – 25	Merah
Tinggi (4)	10 – 14	Oranye
Sedang (3)	5 – 9	Kuning
Rendah (2)	3 – 4	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 – 2	Biru

Toleransi risiko terkait dengan penerimaan dan keluaran manfaat dari pengambilan suatu risiko spesifik dan memiliki sumber daya dan pengendalian yang tepat dalam rangka mentolerir risiko tersebut umumnya diekspresikan dalam kriteria kualitatif dan/atau kuantitatif.

Selera risiko menjadi dasar dalam penentuan toleransi risiko, yakni batasan besaran kuantitatif Level Kemungkinan terjadinya dan Level Dampak Risiko yang dapat diterima, sebagaimana dituangkan pada Kriteria Risiko.

Penetapan Selera Risiko untuk setiap level risiko sebagai berikut :

- Risiko pada level sangat rendah dan rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko;
- Risiko dengan level sedang diambil tindakan jika manfaat lebih besar daripada biaya. Toleransi Risiko berada pada level sedang;
- Risiko dengan level tinggi dan sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan level risikonya.

Tabel 3.6

Selera Risiko

Level Risiko	Besaran Risiko	Tindakan yang diambil
Sangat Tinggi (5)	15 - 25	Diperlukan tindakan segera utk mengelola risiko
Tinggi (4)	10 - 14	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko
Sedang (3)	5 - 9	Diambil tindakan jika manfaat lebih besar daripada biaya
Rendah (2)	3 - 4	Tidak diperlukan tindakan
Sangat Rendah (1)	1 - 2	Tidak diperlukan tindakan

No	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I Risiko Strategis Pemerintah Daerah					
1	Keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata antar waktu dan antar wilayah	RSP.23.09.13.01	3	4	12
2	Rendahnya kemampuan menyerap hasil panen petani	RSP.23.09.13.02	2	3	6
3	Keterbatasan data stok pangan	RSP.23.09.13.03	4	4	16
II Risiko Strategis Perangkat Daerah					
1	Konsumsi Pangan Didominasi kelompok padi-padian	RSO.23.09.13.01	3	5	15
2	Pangan sumber energi masih didominasi hanya padi-padian	RSO.23.09.13.02	4	5	15
3	Belum tercapainya angka konsumsi energi Jawa Tengah	RSO.23.09.13.03	3	5	15
III Risiko Operasional Perangkat Daerah					
1	Ketersediaan energi kurang beragam, masih didominasi oleh satu kelompok jenis pangan tertentu	ROO.23.09.22.01	3	3	9
	Harga tidak stabil.	ROO.23.09.22.02	3	3	9
	Cadangan pangan tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat rawan pangan	ROO.23.09.22.03	4	2	8
	Masih minimnya alternatif pengganti beras di masyarakat.	ROO.23.09.22.04	3	4	12

No	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
2	Data dasar penyusunan NBM kurang akurat	ROO.23.09.22.05	3	2	6
	Data dasar penyusunan prognosa neraca pangan kurang akurat	ROO.23.09.22.06	3	3	9
	Data harga pangan strategis kurang akurat	ROO.23.09.22.07	3	4	12
	Belum optimalnya intervensi harga pangan strategis	ROO.23.09.22.08	3	3	9
3	Kebijakan pengembangan pangan lokal potensi daerah tidak optimal	ROO.23.09.22.09	2	2	4
4	Tidak tersedia data realtime yang menggambarkan kondisi Jawa Tengah	ROO.23.09.22.10	3	4	12
	Lembaga usaha pangan tidak berjalan optimal	ROO.23.09.22.11	2	3	6
	Bahan pangan tidak dapat terdistribusi secara merata di sepanjang wilayah	ROO.23.09.22.12	2	3	6
	Tidak terserapnya produk petani	ROO.23.09.22.13	2	3	6
5	Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dikelola di bawah standar ketentuan yang berlaku	ROO.23.09.22.14	4	4	16
	Tidak tersedia cadangan pangan di Lumbung Pangan Masyarakat	ROO.23.09.22.15	4	2	8
	Mark up harga gabah	ROO.23.09.22.16	3	3	9
	Lokasi tidak tepat sasaran sesuai juknis	ROO.23.09.22.17	3	4	12
	Kualitas dan rendemen gabah menurun	ROO.23.09.22.18	3	2	6
6	Belum ada data dan informasi potensi dan produk olahan komoditas pangan lokal yang dapat diakses masyarakat Jawa Tengah	ROO.23.09.22.19	3	4	12

No	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
	Relevansi antara strategi intervensi pengembangan pangan lokal dengan kondisi di lapangan masih rendah	ROO.23.09.22.20	4	3	12
	Jenis, spesifikasi dan kualitas alat tidak sesuai skala dan kebutuhan riil di lapangan	ROO.23.09.22.21	4	3	12
	keterjangkauan penyebaran informasi B2SA rendah	ROO.23.09.22.22	4	3	12
	Agenda Edukasi B2SA belum optimal	ROO.23.09.22.23	4	3	12
7	Bantuan OPP belum optimal	ROO.23.09.22.24	4	3	12
	Kegiatan OPP tidak berkelanjutan	ROO.23.09.22.25	3	4	12
	Waktu pelaksanaan pengadaan tidak sesuai jadwal dan kualitas barang rendah	ROO.23.09.22.26	4	3	12
8	Penyimpangan terhadap persyaratan keamanan pangan dan mutu PSAT di peredaran.	ROO.23.09.22.27	3	4	12
	Ketidapatuhan pelaku usaha terhadap jaminan mutu dan keamanan yang telah diterbitkan.	ROO.23.09.22.28	3	3	9
9	Kajian tidak dipublikasi	ROO.23.09.22.29	3	2	6
	Pelanggaran label PSAT	ROO.23.09.22.30	4	3	12
	Hasil pengujian tidak ditindaklanjuti	ROO.23.09.22.31	3	2	6
	Informasi keamanan pangan diterima oleh masyarakat secara parsial antar sektor	ROO.23.09.22.32	3	2	6
	Sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan belum	ROO.23.09.22.33	3	3	9

No	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
	menjangkau sasaran secara luas				
10	Kelompok/ pelaku usaha belum memahami prinsip higiene sanitasi dalam penanganan pangan	ROO.23.09.22.34	4	3	12
	Kelompok/ pelaku usaha belum menerapkan prinsip higiene sanitasi dalam penanganan pangan	ROO.23.09.22.35	4	3	12
11	Keterbatasan layanan pengujian mutu pangan	ROO.23.09.22.36	3	3	9
12	Ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap jaminan mutu dan keamanan yang telah diterbitkan.	ROO.23.09.22.37	4	3	12
13	Penanganan daerah yang mengalami rawan pangan dan gizi masih rendah.	ROO.23.09.22.38	2	2	4
14	Fasilitas penanganan pada daerah rawan pangan belum optimal	ROO.23.09.22.39	2	2	4
	Fasilitas bantuan pada lokasi DMP belum optimal	ROO.23.09.22.40	2	2	4
	Stimulan tidak tepat sasaran	ROO.23.09.22.41	3	2	8
	Data dasar Peta SKPG dan atau FSVA yang dihasilkan kurang akurat	ROO.23.09.22.42	4	3	12
IV	Risiko Penunjang Perangkat Daerah				
1	Tidak akuratnya penyajian data awal	RPO.23.09.22.01	3	3	9
	Tidak terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	RPO.23.09.22.02	3	3	9
	Tidak akuratnya penyajian data awal penyusunan laporan dan verifikasi keuangan	RPO.23.09.22.03	3	3	9
2	Ketidaksesuaian rincian RAB dengan pilihan	RPO.23.09.22.04	2	3	6

No	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
	indikator kegiatan/sub kegiatan				
	Tidak semua RAB barang/jasa yang dibutuhkan ada di eSHB	RPO.23.09.22.05	2	3	6
	Tidak tercapainya salah satu atau beberapa indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan	RPO.23.09.22.06	2	3	6
3	1. Terjadinya kerusakan jaringan listrik dan komponen listrik 2. Kabel listrik dimakan tikus	RPO.23.09.22.07	3	3	9
	Terhambatnya kegiatan kantor	RPO.23.09.22.08	3	2	6
	Terhambatnya pekerjaan kantor	RPO.23.09.22.09	3	3	9
	Pengadaan alat Laboratorium tidak disetujui oleh Ketua TKDN/Sekda	RPO.23.09.22.10	3	3	9
	Dalam pelaksanaan kegiatan kantor menjadi tidak nyaman	RPO.23.09.22.11	3	2	6
	Tamu yang datang dengan konfirmasi waktu yang terbatas tidak dapat ter spj konsumsinya	RPO.23.09.22.12	3	2	6
	Kehadiran peserta rapat koordinasi terhambat dan kurang maksimal	RPO.23.09.22.13	2	1	2
	Tertundanya keputusan rapat	RPO.23.09.22.14	3	3	9
	1. Arsip dimakan rayap 2. Tulisan pada arsip hilang/luntur	RPO.23.09.22.15	3	3	9
	Gangguan eksternal dari penyedia jaringan internet	RPO.23.09.22.16	2	3	6
	Sarpras pencetak tidak berfungsi maksimal	RPO.23.09.22.17	3	3	9

No	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
	Ruangan dan lingkungan kantor tidak terawat	RPO.23.09.22.18	3	3	9
4	Distribusi surat menyurat masih membutuhkan waktu yang lama	RPO.23.09.22.19	2	3	6
	Terjadinya kenaikan tarif penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	RPO.23.09.22.20	3	3	9
	Honor pegawai kontrak tidak dapat disesuaikan dengan kinerja	RPO.23.09.22.21	2	2	4
	Terjadinya tindak kriminalitas dan kebersihan lingkungan terbungkalai	RPO.23.09.22.22	2	3	6
5	Kinerja JFT (Jabatan Fungsional Tertentu) penyetaraan harus mengimbangi kinerja JFT murni	RPO.23.09.22.23	2	3	6
	Tidak semua aparatur mengikuti kegiatan	RPO.23.09.22.24	3	2	6
6	Tingginya risiko kerusakan dan kehilangan Barang Milik Daerah	RPO.23.09.22.25	4	2	8
	Tanah tidak dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tupoksi	RPO.23.09.22.26	3	2	6
7	Gedung rusak dan membahayakan bagi pengguna dan pegawai	RPO.23.09.22.27	4	2	8
	Kerusakan gedung semakin parah dan gedung tidak dapat digunakan	RPO.23.09.22.28	2	3	6
	Markup Nilai kontrak rehab gedung	RPO.23.09.22.29	3	2	6
	1. Pekerjaan terhambat karena komputer terkena virus	RPO.23.09.22.30	3	3	9

No	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
	2. Tidak terawatnya peralatan dan perlengkapan kantor				
	Pekerjaan kantor terhambat karena sarana dan prasarana kantor banyak yang rusak dan tidak terawat	RPO.23.09.22.31	3	3	9
	Kendaraan banyak yang tidak layak jalan untuk operasional kegiatan	RPO.23.09.22.32	3	2	6

Penentuan risiko prioritas dan *acceptable/unacceptable risk*, digunakan diagram risiko berdasarkan skala dampak dan probabilitas risiko serta kriteria level risiko/*risk appetite* yang telah ditentukan. Diagram risiko dapat dibuat skala 5, dengan ilustrasi sebagai berikut :

Diagram 3. 1
Penilaian Risiko Prioritas

Matriks Analisis Risiko		Dampak/Konsekuensi				
		Tidak signifikan	Kecil	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
		1	2	3	4	5
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Hampir Pasti	5			RSO.23.09.22.01 RSO.23.09.22.02 RSO.23.09.22.03	
	Kemungkinan besar	4			RSP.23.09.22.01 ROO.23.09.22.04 ROO.23.09.22.07 ROO.23.09.22.10 ROO.23.09.22.17 ROO.23.09.22.19 ROO.23.09.22.25 ROO.23.09.22.27	RSP.23.09.22.03 ROO.23.09.22.14
	Mungkin	3	RSP.23.09.22.02 ROO.23.09.22.11 ROO.23.09.22.12 ROO.23.09.22.13 RPO.23.09.22.04 RPO.23.09.22.05 RPO.23.09.22.06 RPO.23.09.22.19 RPO.23.09.22.22 RPO.23.09.22.23 RPO.23.09.22.28	ROO.23.09.22.01 ROO.23.09.22.02 ROO.23.09.22.06 ROO.23.09.22.08 ROO.23.09.22.16 ROO.23.09.22.28 ROO.23.09.22.33 ROO.23.09.22.36 RPO.23.09.22.01 RPO.23.09.22.02 RPO.23.09.22.03 RPO.23.09.22.07 RPO.23.09.22.09 RPO.23.09.22.10 RPO.23.09.22.14 RPO.23.09.22.15 RPO.23.09.22.17 RPO.23.09.22.18 RPO.23.09.22.20 RPO.23.09.22.30 RPO.23.09.22.31	ROO.23.09.22.20 ROO.23.09.22.21 ROO.23.09.22.22 ROO.23.09.22.23 ROO.23.09.22.24 ROO.23.09.22.26 ROO.23.09.22.30 ROO.23.09.22.34 ROO.23.09.22.35 ROO.23.09.22.37 ROO.23.09.22.42	
	Jarang	2	ROO.23.09.22.09 ROO.23.09.22.38 ROO.23.09.22.39	ROO.23.09.22.05 ROO.23.09.22.18 ROO.23.09.22.29	ROO.23.09.22.03 ROO.23.09.22.15 RPO.23.09.22.25	

			ROO.23.09.22.40 RPO.23.09.22.21	ROO.23.09.22.31 ROO.23.09.22.32 ROO.23.09.22.41 RPO.23.09.22.08 RPO.23.09.22.11 RPO.23.09.22.12 RPO.23.09.22.16 RPO.23.09.22.24 RPO.23.09.22.26 RPO.23.09.22.29 RPO.23.09.22.32	RPO.23.09.22.27	
	Sangat jarang	1	RPO.23.09.22.13			
Keterangan :		Sangat Rendah 1-2	Rendah 3-4	Sedang 5-9	Tinggi 10-14	Sangat Tinggi 15-25

D. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di pemerintah daerah yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko.

Tabel 3. 7
Pengendalian Yang Sudah Dilakukan

No	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang sudah ada
I Risiko Strategis Pemerintah Daerah		
1	Keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata antar waktu dan antar wilayah	Fasilitasi Distribusi Pangan, Subsidi Harga Pangan
2	Rendahnya kemampuan menyerap hasil panen petani	Pemberdayaan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) dan lembaga usaha lainnya
3	Keterbatasan data stok pangan	Pengembangan Aplikasi SISLOGDA, Kerjasama dengan offtaker, Survei stok dan harga di pelaku usaha pangan (produsen dan konsumen) di 35 kabupaten/kota
II Risiko Strategis Perangkat Daerah		
1	Konsumsi pangan di dominasi kelompok padi-padian	Rapat Koordinasi Perhitungan Pola Pangan Harapan berdasarkan Susenas BPS.
2	Pangan Sumber energi masih didominasi hanya dari padi - padian.	Pengembangan pangan lokal utamanya pengganti beras dan terigu
3	Belum tercapainya angka konsumsi energi Jawa Tengah	Edukasi dan Promosi Pola konsumsi pangan B2SA berbasis pangan lokal
III Risiko Operasional Perangkat Daerah		
1	Masih minimnya alternatif pengganti beras di masyarakat	Penguatan Pelaku Usaha/UMKM Pengolah Pangan Lokal
2	Data harga pangan strategis kurang akurat	Koordinasi dengan Dinas teknis terkait dan Instansi pangan Kabupaten Kota
3	Tidak tersedia data realtime yang menggambarkan kondisi Jawa Tengah	Koordinasi dengan OPD terkait, selain berdasarkan penghitungan prognosa, juga dilakukan sampling, integrasi data dengan Aplikasi lain.
4	Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dikelola di bawah standar ketentuan yang berlaku	Peningkatan CPPD Prov, melalui penguatan kapasitas (gabah, SDM, sarpras)

No	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang sudah ada
	Lokasi tidak tepat sasaran sesuai juknis	Fasilitasi, Pendampingan, Penguatan Kelembagaan
5	Belum ada data dan informasi potensi dan produk olahan komoditas pangan lokal yang dapat diakses masyarakat Jawa Tengah	Pendataan melalui koordinasi dengan Dinas Pengampu urusan pangan di Kabupaten/Kota
	Relevansi antara strategi intervensi pengembangan pangan lokal dengan kondisi di lapangan masih rendah	Penyusunan strategi intervensi bersifat top-down
	Jenis, spesifikasi dan kualitas alat tidak sesuai skala dan kebutuhan riil di lapangan	Paket alat ditentukan oleh dinas dan diseragamkan kepada seluruh penerima manfaat
	keterjangkauan penyebaran informasi B2SA rendah	Penyebaran edukasi melalui pertemuan fisik
	Agenda Edukasi B2SA belum optimal	Penyebaran edukasi melalui lembaga PKK
6	Bantuan OPP belum optimal	Verifikasi calon Penerima, Monitoring dan Evaluasi
	Kegiatan OPP tidak berkelanjutan	Pernyataan kesanggupan dari calon penerima manfaat
	Waktu pelaksanaan pengadaan tidak sesuai jadwal dan kualitas barang rendah	Jadwal pelaksanaan memperhatikan lama pekerjaan
7	Penyimpangan terhadap persyaratan keamanan pangan dan mutu PSAT di peredaran.	SOP pelaksanaan pengawasan PSAT secara online dan offline
8	Pelanggaran label PSAT	Pengawasan PSAT di peredaran
9	Kelompok/ pelaku usaha belum menerapkan prinsip higiene sanitasi dalam penanganan pangan	Pengawasan dan pembinaan kelompok/pelaku usaha
	Kelompok/ pelaku usaha belum menerapkan prinsip higiene sanitasi dalam penanganan pangan	Pengawasan dan pembinaan kelompok/pelaku usaha
10	Ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap jaminan mutu dan keamanan yang telah diterbitkan.	Pelayanan Sertifikasi dan Registrasi secara OSS (online) dan dilaksanakannya surveilen secara berkala terhadap pelaku usaha yang telah memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan dari OKKPD
11	Data dasar Peta SKPG dan atau FSVA yang dihasilkan kurang akurat	Koordinasi dengan Dinas teknis terkait dan Instansi pangan Kabupaten Kota

E. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

1. Menghindari risiko (*avoid*)

Menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan risiko. Penghindaran risiko dapat menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat menolak risiko. Penghindaran risiko secara tidak tepat justru dapat meningkatkan signifikansi risiko lainnya atau mengakibatkan hilangnya peluang memperoleh manfaat.

2. Mengubah/mengurangi kemungkinan munculnya risiko (*abate*)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah kemungkinan munculnya risiko agar kemungkinan terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah pencegahan (*prevention*).

3. Mengubah/mengurangi konsekuensi/dampak risiko (*mitigate*)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/ mengurangi konsekuensi/dampak risiko agar kerugian menjadi berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah penanggulangan.

Abate dan mitigate terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu mengurangi risiko (*reduce*).

4. Membagi risiko (*share*) atau mentransfer risiko

Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau berbagi sebagian risiko. Contoh mekanismenya antara lain meliputi kontrak-kontrak, asuransi, dan struktur organisasi seperti kemitraan dan *joint ventures* untuk menyebarkan tanggungjawab dan kewajiban. Terkait dengan pembagian risiko dengan instansi lain, umumnya akan terdapat biaya finansial atau manfaat yang timbul, misalnya premi asuransi. Jika risiko dibagi, baik keseluruhan maupun sebagian, maka instansi yang mentransfer risiko mendapat risiko baru, yaitu instansi lain yang memperoleh transfer risiko tersebut tidak dapat mengelola risiko itu secara efektif.

5. Menerima atau mempertahankan risiko (*accept/retain*)

Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat terjadi suatu instansi tidak memiliki pilihan respon yang lebih baik, selain menerima risiko tersebut.

Dari pembahasan dalam tim maka ditetapkan pengendalian yang masih dibutuhkan tergambar sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 3. 8
Penilaian Atas Kegiatan Yang Ada dan Masih Dibutuhkan

No	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang dibangun untuk mengendalikan risiko	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
I Risiko Strategis Pemerintah Daerah				
1	Keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata antar waktu dan antar wilayah	Sinergitas dengan Kab/Kota sehingga hasil panen dapat dijangkau seluruh Jateng	Gubernur, Stakeholders terkait	2023
2	Rendahnya kemampuan menyerap hasil panen petani	Pembinaan dan pendampingan dari stakeholders terkait, pengembangan kemitraan	Gubernur, Stakeholders terkait	2023
3	Keterbatasan data stok pangan	Koordinasi data dengan OPD terkait	Gubernur, Stakeholders terkait	2023
II Risiko Strategis Perangkat Daerah				
1	Konsumsi pangan di dominasi kelompok padi-padian	Merumuskan intervensi berdasarkan <i>trend line</i> angka konsumsi tahun sebelumnya.	Kepala Dinas	TW 2
2	Pangan Sumber energi masih didominasi hanya dari padi - padian.	Penguatan pelaku usaha olahan pangan lokal melalui Fasilitasi stimulan alat olahan pangan lokal dan berbagai pelatihan sesuai kebutuhan	Kepala Dinas	TW 4
3	Belum tercapainya angka konsumsi energi Jawa Tengah	Sinergi jejaring edukasi dan promosi dengan lintas OPD dan Kab/Kota serta pemanfaatan media online secara optimal	Kepala Dinas	TW 4
III Risiko Operasional Perangkat Daerah				
1	Masih minimnya alternatif pengganti beras di masyarakat	Intervensi mendasarkan kebutuhan di Lapangan	Ka. Bidang KPP	TW 4
2	Data harga pangan strategis kurang akurat	Melakukan bimbingan teknis metode penghitungan penyusunan NBM dan NPS	Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan	TW 4
3	Tidak tersedia data realtime yang menggambarkan kondisi Jawa Tengah	Pemutakhiran data secara berkala, Menambah jumlah sample survei, Koordinasi Penyediaan Data dengan Enumerator	Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan	Awal tahun, evaluasi semester I dan II
4	Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dikelola di bawah standar ketentuan yang berlaku	Pengadaan CPP sesuai dengan ketersediaan anggaran, perbaikan sarpras	Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan	Pengadaan CPP Oktober 2023
	Lokasi tidak tepat sasaran sesuai juknis	Pembinaan dan Pendampingan Kelompok baik dalam hal teknis maupun administrasi	Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan	Awal tahun, evaluasi semester I dan II
5	Belum ada data dan informasi potensi dan produk olahan komoditas pangan lokal yang dapat diakses masyarakat Jawa Tengah	Penentuan prioritas komoditas pangan lokal, serta pendataan spesifik wilayah	Ka. Bidang KPP	2023
	Relevansi antara strategi intervensi pengembangan pangan lokal dengan kondisi di lapangan masih rendah	Penyusunan identifikasi kebutuhan pengembangan pangan lokal	Ka. Bidang KPP	2023
	Jenis, spesifikasi dan kualitas alat tidak sesuai skala dan kebutuhan riil di lapangan	Penentuan alat berdasarkan kebutuhan penerima manfaat	Ka. Bidang KPP	2023
	keterjangkauan penyebaran informasi B2SA rendah	Edukasi dan promosi melalui media online dan media sosial	Ka. Bidang KPP	2023
	Agenda Edukasi B2SA belum optimal	Edukasi dan Promosi B2SA melalui program "B2SA goes to school" dan "B2SA goes to Campus"	Ka. Bidang KPP	2023
6	Bantuan OPP belum optimal	Pengalokasian honorarium kepada pendamping lapangan/penyuluh yang lebih	Ka. Bidang KPP	2023

No	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang dibangun untuk mengendalikan risiko	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
		memadai dalam rangka pembinaan/pemberdayaan masyarakat penerima OPP		
	Kegiatan OPP tidak berkelanjutan	Melakukan kerjasama dengan perangkat desa untuk lebih dapat mengoptimalkan kegiatan OPP melalui motivasi dan dengan tambahan bantuan dana desa untuk keberlanjutan kegiatan OPP	Ka. Bidang KPP	2023
	Waktu pelaksanaan pengadaan tidak sesuai jadwal dan kualitas barang rendah	Penataan jadwal pekerjaan memperhatikan prakiraan cuaca di lokasi calon penerima	Ka. Bidang KPP	2023
7	Penyimpangan terhadap persyaratan keamanan pangan dan mutu PSAT di peredaran.	Peningkatan intensitas pengawasan PSAT dan edukasi	Ka. Bidang Keamanan Pangan	TW 1 s/d TW 4
		Pemberian sanksi administrasi	Ka. Dinas	TW 4
8	Pelanggaran label PSAT	Review hasil pengawasan dan penyusunan tindak lanjut hasil pengawasan	Kabid Keamanan Pangan	TW 3
9	Kelompok/ pelaku usaha belum menerapkan prinsip higiene sanitasi dalam penanganan pangan	Sosialisasi, pelatihan pelaku usaha dan petugas secara online	Kabid Keamanan Pangan	TW 2, TW 3
	Kelompok/ pelaku usaha belum menerapkan prinsip higiene sanitasi dalam penanganan pangan	Sosialisasi, pelatihan pelaku usaha dan petugas secara online	Kabid Keamanan Pangan	TW 2, TW 3
10	Ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap jaminan mutu dan keamanan yang telah diterbitkan.	Surveilen dilakukan berbasis risiko pelaku usaha yang terindikasi tidak mematuhi regulasi jaminan mutu dan keamanan	Kepala BPMKP	TW 4
11	Data dasar Peta SKPG dan atau FSVA yang dihasilkan kurang akurat	Bimtek Penyusunan SKPG dan/atau FSVA.	Ka. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Juli Mg ke III 2023

BAB IV RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Oleh karena itu tim menentukan Rancangan Informasi dan Komunikasi sebagai berikut :

Tabel 4. 1
Rancangan Informasi dan Komunikasi

No	Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan (Tgl, Bln)	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	H
I Risiko Strategis Pemerintah Daerah							
1	Sinergitas dengan kabupaten/kota, kerjasama dengan toko mitra sehingga dapat mengoptimalkan pemerataan keterjangkauan bahan pangan	surat/surat edaran	Dishanpan	Dinas Kab/kota	12 bulan		Sinkronisasi Operasional Pelaksanaan Kegiatan Distribusi Pangan
2	Pembinaan dan pendampingan dari stakeholder terkait, pengembangan kemitraan	Nota dinas/surat tugas/surat kemitraan	Dishanpan, Biro Hukum, Dinas Kominfo	Masyarakat, asosiasi, pemda (stackholder terkait)	12 bulan		
3	Koordinasi data dengan OPD terkait	Surat Edaran Gubernur	Dishanpan, Biro Hukum	OPD terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota	12 bulan		
II Risiko Strategis Perangkat Daerah							
1	Merumuskan intervensi berdasarkan <i>trend line</i> angka konsumsi tahun sebelumnya.	Surat Kepala Dinas	DISHANPAN	Dinas Kabupaten/Kota			
2	Penguatan pelaku usaha olahan pangan lokal melalui Fasilitasi stimulan alat olahan pangan lokal dan berbagai pelatihan sesuai kebutuhan	Nota Dinas/Surat Kepala Dinas	DISHANPAN	BAPPEDA Prov. Jateng, Dinas Kabupaten/Kota			
3	Sinergi jejaring edukasi dan promosi dengan lintas OPD dan Kab/Kota serta pemanfaatan media online secara optimal	Surat Kepala Dinas	Dishanpan	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah			
II I Risiko Operasional Perangkat Daerah							
1	Intervensi mendasarkan kebutuhan riil di Lapangan	Juknis/SK	DISHANPAN	Calon Penerima Manfaat	TW 4		
2	Melakukan bimbingan teknis metode penghitungan	Surat/SK/Nota Dinas/Aplikasi	Distanbun, Disnakeswan, DKP, Disperindag,	Instansi Pusat, Provinsi,	Juni 2023		

No	Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan (Tgl, Bln)	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	H
	penyusunan NBM dan NPS		Bulog, BPS, Balai Karantina Pertanian, Dinas pangan Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota			
3	Pemutakhiran data secara berkala, Menambah jumlah sample survei, Koordinasi Penyediaan Data dengan Enumerator	Surat, rapat koordinasi, SK Gubernur, Peraturan Gubernur Jawa Tengah	Dinas teknis terkait: Distanbun; Disnakkeswan, DKP, Disperindag, BPS, Badan Karantina	Dinas Ketahanan Pangan	12 bulan	Januari 2023. Koordinasi Penyediaan data : Feb-Des. Rekap dan olah data bulanan	
4	Pengadaan CPP sesuai dengan ketersediaan anggaran, perbaikan sarpras	surat, koordinasi, website	DISHANPAN	Dinas terkait, Dinas kab/kota	Oktober 2023		
	Pembinaan dan Pendampingan Kelompok baik dalam hal teknis maupun administrasi	Surat, Bimtek, koordinasi, pendampingan	DISHANPAN	Dinas terkait, Dinas kab/kota, pengelola Lumbung Pangan Masyarakat	Maret - Desember 2023		
5	Penentuan prioritas komoditas pangan lokal, serta pendataan spesifik wilayah	Surat, Nota Dinas, Laporan,	Dishanpan	OPD terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota	TW 4		
	Penyusunan identifikasi kebutuhan pengembangan pangan lokal	Surat, Nota Dinas, Laporan,	Dishanpan	OPD Kabupaten/Kota dan calon penerima manfaat	TW 4		
	Penentuan alat berdasarkan kebutuhan penerima manfaat	Surat	Dishanpan	OPD Kabupaten/Kota dan calon penerima manfaat	TW 4		
	Edukasi dan promosi melalui media online dan media sosial	Media sosial	Dishanpan	masyarakat	TW 4		
	Edukasi dan Promosi B2SA melalui program "B2SA goes to school" dan "B2SA goes to Campus"	Surat, Nota Dinas, Laporan,	Dishanpan	OPD terkait di Provinsi, Kabupaten/Kota dan masyarakat	TW 4		
6	Pengalokasian honorarium kepada pendamping lapangan/penyuluh yang lebih memadai dalam rangka pembinaan/pemberdayaan masyarakat penerima OPP	Pergub Rincian APBD	TAPD	Dishanpan	TW 4		
	Melakukan kerjasama dengan perangkat desa untuk lebih dapat	Petunjuk Teknis	Dishanpan	Calon penerima	TW 4		

No	Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan (Tgl, Bln)	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	H
	mengoptimalkan kegiatan OPP melalui motivasi dan dengan tambahan bantuan dana desa untuk keberlanjutan kegiatan OPP						
	Penataan jadwal pekerjaan memperhatikan prakiraan cuaca di lokasi calon penerima	Rencana Kerja Operasional	Dishanpan	Penyedia	TW 4		
7	Peningkatan intensitas pengawasan PSAT dan edukasi	Surat undangan, Laporan, sosialisasi melalui medsos	Dishanpan	Pelaku usaha, masyarakat, dan petugas pengawas	TW 1 s/d TW 4		
	Pemberian sanksi administrasi	Surat peringatan	Dishanpan	Pelaku usaha	TW 4		
8	Review hasil pengawasan dan penyusunan tindak lanjut hasil pengawasan	pedoman teknis pengambilan sampel	Bidang Keamanan Pangan	Petugas dinas teknis, pelaku usaha	TW 1		
9	Sosilasi kepada pelaku usaha, pelatihan higiene sanitasi kepada pelaku usaha, pembinaan higiene sanitasi kepada pelaku usaha	Surat undangan	Bidang Keamanan Pangan	pelaku usaha	TW 2, TW 4		
10	Surveilen dilakukan berbasis risiko pelaku usaha yang terindikasi tidak mematuhi regulasi jaminan mutu dan keamanan	Surat Tugas	BPMKP/OKK PD	pelaku usaha	TW II, TW III, TW IV		
11	Bimtek SDM Penyusunan dan/atau FSVA. SKPG	surat/surat edaran/web	Tim Penyusun SKPG dan/atau FSVA dan Kab/Kota.	Dinas Kabupaten dan masyarakat Jawa Tengah	TW 4		

BAB V RANCANGAN PEMANTAUAN

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif.

Pemantauan dan Evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan Evaluasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

Tabel 5. 1
Rancangan Pemantauan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
I Risiko Strategis Pemerintah Daerah						
1	sinergitas dengan kab/kota shg hasil panen dpt dijangkau seluruh jateng	Surat/surat edaran/web	Kepala Dinas	12 bulan	Koordinasi Bulan Januari, Februari 2023	SOK Distribusi Pangan dlm rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2	Pembinaan dan pendampingan dari stakeholder terkait, pengembangan kemitraan	Nota dinas/surat tugas/surat edaran/sk/web	Kepala Dinas	12 bulan	Februari 2023	Temu Koordinasi
3	Koordinasi data dengan OPD terkait	Surat Edaran Gubernur	Gubernur	Nov-23	Januari 2023. Koordinasi Penyediaan data : Maret 2023, evaluasi TW 1	
II Risiko Strategis Perangkat Daerah						
1	Merumuskan intervensi berdasarkan <i>trend line</i>	Surat Kepala Dinas	Kepala Dinas	April 2023		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
	angka konsumsi tahun sebelumnya.					
2	Penguatan pelaku usaha olahan pangan lokal melalui Fasilitasi stimulan alat olahan pangan lokal dan berbagai pelatihan sesuai kebutuhan	Nota Dinas/Surat Kepala Dinas	Kepala Dinas	April 2023		
3	Sinergi jejaring edukasi dan promosi dengan lintas OPD dan Kab/Kota serta pemanfaatan media online secara optimal	Surat/surat edaran/web	Kepala Dinas	November, 2023		
III	Risiko Operasional Perangkat Daerah					
1	Intervensi mendasarkan kebutuhan riil di Lapangan	Nota Dinas	Kepala Dinas	Desember 2023		
1	Melakukan bimbingan teknis metode penghitungan penyusunan NBM dan NPS	Surat/SK/Nota dinas/aplikasi	Kepala Dinas	Juni 2023		
2	Pemutakhiran data secara berkala, Menambah jumlah sample survei, Koordinasi Penyediaan Data dengan Enumerator	Surat, rapat koordinasi	Kepala Bidang	12 bulan		
3	Pengadaan CPP sesuai dengan ketersediaan anggaran, perbaikan sarpras	surat, koordinasi	Kepala Dinas	12 bulan		
	Pembinaan dan Pendampingan Kelompok baik dalam hal teknis maupun administrasi	Surat, Bimtek, koordinasi, pendampingan	Kepala Dinas	12 bulan		
4	Penentuan prioritas komoditas pangan lokal, serta pendataan spesifik wilayah	Surat/surat edaran/web	Kepala Dinas	Desember, 2023		
	Penyusunan identifikasi kebutuhan pengembangan pangan lokal	Surat/surat edaran/web	Kepala Dinas	Desember, 2023		
	Penentuan alat berdasarkan kebutuhan penerima manfaat	Surat/surat edaran/web	Kepala Dinas	Desember, 2023		
	Edukasi dan promosi melalui media online dan media sosial	Surat/surat edaran/web	Kepala Dinas	Desember, 2023		
	Edukasi dan Promosi B2SA melalui program "B2SA goes to school" dan "B2SA goes to Campus"	Surat/surat edaran/web	Kepala Dinas	Desember, 2023		
5	Pengalokasian honorarium kepada pendamping lapangan/penyuluh yang lebih memadai dalam rangka	Surat/surat edaran/web	Kepala Dinas	Desember, 2023		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
	pembinaan/pemberdayaan masyarakat penerima OPP					
	Melakukan kerjasama dengan perangkat desa untuk lebih dapat mengoptimalkan kegiatan OPP melalui motivasi dan dengan tambahan bantuan dana desa untuk keberlanjutan kegiatan OPP	Nota Dinas	Kepala Dinas	Desember, 2023		
6	Peningkatan intensitas pengawasan PSAT dan edukasi	Surat undangan, Laporan, sosialisasi melalui medsos	Ka. Bid Keamanan	April, Juli, Okt, Des 2023		
	Pemberian sanksi administrasi	Surat peringatan	Ka. Dinas	Desember 2023		
7	Review hasil pengawasan dan penyusunan tindak lanjut hasil pengawasan	Surat	Kepala Dinas	Maret		
8	Sosialisasi, pelatihan pelaku usaha dan petugas secara online	Surat	Kepala Dinas	Sep-23		
9	Surveilen dilakukan berbasis risiko pelaku usaha yang terindikasi tidak mematuhi regulasi jaminan mutu dan keamanan	Surat Tugas	Kepala Dinas	12 bulan		
10	Bimtek SDM Penyusunan SKPG dan/atau FSVA.	surat/surat edaran/web	Kepala Dinas	Juli 2023		

BAB VI PENUTUP

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses yang berkelanjutan, menekankan pada soft control, dan keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh karakteristik sumber daya manusia. Efektivitas pengembangan lingkungan pengendalian sangat bergantung pada keberhasilan penegakan integritas dan etika, serta adanya komitmen dan teladan dari pimpinan tertinggi untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif. Demikian juga efektivitas identifikasi risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, sangat dipengaruhi oleh pertimbangan, judgement, dan komitmen dari seluruh personil dalam organisasi.

Selanjutnya Rencana Tindak Pengendalian (RTP) disusun sebagai tindak lanjut Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan uraian tentang bagaimana instansi pemerintah diharapkan dapat mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko. Rencana Tindak Pengendalian Intern Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.